

ANALISIS SISTEM UPAH PADA KULI ANGKUT PASAR BEUREUNUEN

¹Mariana, ²Safrijal

¹STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: marianamer02@gmail.com

²STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: safrijalmeutuawah@gmail.com

Received Date; 10 Januari 2024 Revised Date; 13 Januari 2024 Accepted Date; 17 Januari 2024	ABSTRACT <i>Labor and workers' wages are one of the central issues in today's industrial economy, where the majority of the population depends on the wages they earn, starting from low wage levels to the work contract system. All of this has become an issue that has sparked demonstrations among workers. Labor is not a simple resource to organize. Many factors influence these resources, such as the environment, local traditions, experience, age, leadership, wages, and so on. All these factors together form the complexity of managing a workforce. The aim of this research is to determine the wage practices of porters at the Beureunuen market and to analyze the pay system for porters at the Beureunuen market. The research method used is qualitative, by conducting field research using interviews, documentation and observation. The research results show that the practice of paying porters at Beureunuen Market is implemented using a daily wage payment system, taking into account the amount of repas. Wages are paid daily at a percentage of 15% of the repas, and the overall wages are divided equally among all the porters involved.</i>
<i>The Keywords:</i> Wages The porters Beureunuen Market	
<i>Kata Kunci:</i> Upah Kuli Angkut Pasar Beureunuen	
	ABSTRAK Buruh dan upah buruh merupakan salah satu isu sentral dalam ekonomi industri saat ini, di mana mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya pada upah yang diperoleh, mulai dari tingkat upah yang rendah hingga sistem kontrak kerja. Keseluruhan ini menjadi isu yang memicu demonstrasi dari kalangan buruh. Buruh bukanlah sumber daya yang sederhana untuk diorganisir. Banyak faktor yang mempengaruhi sumber daya tersebut, seperti lingkungan, tradisi lokal, pengalaman, usia, kepemimpinan, upah, dan sebagainya. Semua faktor ini bersama-sama membentuk kompleksitas dalam mengelola tenaga kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengupahan pada kuli angkut di pasar Beureunuen dan analisis sistem upah kuli angkut pasar Beureunuen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan melakukan penelitian lapangan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan kuli angkut di Pasar Beureunuen dilaksanakan

	dengan sistem pembayaran upah harian, mempertimbangkan jumlah repas. Upah dibayar setiap hari dengan persentase 15% dari repas, dan keseluruhan upah dibagi rata di antara semua kuli angkut yang terlibat.
--	---

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Ketenagakerjaan adalah sebuah bidang atau aspek dalam dunia ekonomi dan manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan tenaga kerja atau pekerja. Ketenagakerjaan mencakup berbagai hal, seperti kebijakan penggajian, kondisi kerja, hubungan industrial, pelatihan karyawan, dan perlindungan hak-hak pekerja. Ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada keterbatasan lapangan kerja atau peluang, serta rendahnya produktivitas, tetapi juga melibatkan sejumlah penyebab yang beragam dan kompleks (Atiyatna et al. 2016). Permasalahannya bersifat multidimensional¹ yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan kebijakan yang bersifat multidimensional pula. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi beberapa ketidakseimbangan. Pertumbuhan angkatan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sementara penawaran lapangan pekerjaan tidak sejalan dengan jumlah tersedianya tenaga kerja.

Saat ini, permasalahan ketenagakerjaan belum sepenuhnya teratasi, mencakup masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, pelatihan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Tantangan ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya sistem pemerintahan dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan, yang sering kali menunjukkan kecenderungan untuk menyimpang dari norma yang seharusnya. Di samping itu, koordinasi dan tindakan antar lembaga pemerintah masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan lebih optimal dan berhati-hati (Avzurni and Nuroini 2023).

¹ Kata "multidimensional" merujuk pada konsep atau karakteristik yang melibatkan lebih dari satu dimensi atau aspek. Dalam berbagai konteks, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki banyak komponen, lapisan, atau elemen yang saling terkait. Pemahaman multidimensional dapat mencakup berbagai sudut pandang atau faktor yang mempengaruhi atau membentuk sesuatu. Misalnya, dalam ilmu pengetahuan, analisis multidimensional dapat merujuk pada pemeriksaan beberapa variabel atau dimensi sekaligus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Contoh lainnya dapat termasuk analisis multidimensional dalam statistik, pemodelan multidimensional dalam ilmu komputer, atau pemikiran multidimensional dalam konteks filosofi atau seni. Dengan kata lain, istilah ini mencerminkan kompleksitas atau kerumitan yang melibatkan lebih dari satu aspek atau elemen dalam konteks tertentu.

Permasalahan buruh dan upah buruh merupakan salah satu isu sentral dalam ekonomi industri saat ini, di mana mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya pada upah yang diperoleh, mulai dari tingkat upah yang rendah hingga sistem kontrak kerja. Keseluruhan ini menjadi isu yang memicu demonstrasi dari kalangan buruh. Ritual tahunan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi ajang tarik-menarik antara dua kepentingan, yaitu kepentingan buruh dan pemilik modal/pengusaha.

Buruh bukanlah sumber daya yang sederhana untuk diorganisir. Banyak faktor yang mempengaruhi sumber daya tersebut, seperti lingkungan, tradisi lokal, pengalaman, usia, kepemimpinan, upah, dan sebagainya. Semua faktor ini bersama-sama membentuk kompleksitas dalam mengelola tenaga kerja (Bukit et al. 2018). Pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan diharapkan memberikan upah yang tinggi seringkali menggambarkan situasi di mana pekerjaan tersebut melibatkan tugas atau kondisi yang membawa risiko keselamatan atau kesehatan yang signifikan (Okoye et al. 2022).

Demonstrasi untuk menuntut kenaikan UMK selalu dilakukan oleh kaum buruh dengan alasan bahwa tingkat UMK yang telah ditetapkan belum mencukupi kebutuhan pokok pekerja. Di sisi lain, pihak pengusaha selalu mengklaim bahwa kenaikan UMK akan berdampak negatif pada usaha, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan atau beralih ke efisiensi sumber daya manusia yang berujung pada PHK (Syakur 2016). Selain itu, masih banyak pengusaha yang tidak taat dalam penerapan upah minimum dan memberikan upah di bawah standar minimum. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi perekonomian kontemporer yang berbasis industri. Ketidakharmonisan hubungan antara pekerja dan pengusaha ini tentu akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas usaha, serta pada akhirnya, perekonomian nasional.

Sistem pengupahan² yang baik sangat menentukan kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya akan berdampak pada masa depan perusahaan (Ramadana and Rahmaniari 2023; Safriadi 2018). Dengan memberikan upah yang layak, diharapkan pekerja dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam berproduksi, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri. Penelitian ini difokuskan pada sistem pengupahan kuli angkut, yang merupakan pelaku ekonomi dalam bidang penyedia jasa. Kuli angkut barang dapat dijumpai di pasar, terminal. Keberadaan kuli angkut barang merupakan fenomena sosio-ekonomi yang tidak

² Pengupahan menurut perspektif ekonomi Islam, besaran upah ditetapkan melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah bahwa kesepakatan tersebut harus bersifat saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.

dapat dihindari; sebagian masyarakat yang harus mempertahankan hidupnya dengan menjadi kuli angkut barang.

Semua persoalan yang telah diuraikan di atas merupakan tantangan yang sulit dihindari. Namun, semua pihak seharusnya dapat menciptakan kondisi yang kondusif antara pengusaha dan kuli angkut. Observasi awal yang penulis lakukan di pasar Beureunuen menunjukkan bahwa kuli angkut mendapatkan penghasilan sebesar Rp 10.000 untuk mengangkut 1 ton beras, setara dengan 20 karung beras dengan beban per karung seberat 50 kg. Selain itu, menerima bayaran sekitar Rp 5.000 hingga Rp 15.000 untuk setiap pengiriman barang kepada pembeli, tergantung pada kebaikan hati orang yang memberikan tugas tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pembayaran upah kepada kuli angkut. Pendekatan deskriptif kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena atau kejadian, dalam hal ini, proses pembayaran upah kepada kuli angkut. Dengan menggunakan metode ini, penelitian akan lebih fokus pada deskripsi rinci, interpretasi, dan pemahaman konteks di sekitar praktik pembayaran upah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas dalam proses pembayaran upah, serta memahami pandangan dan pengalaman para kuli angkut terkait dengan hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik pembayaran upah kepada kuli angkut dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif (I. Mariana 2021; M. Mariana 2023; Rahmatullah, Mariana, and Armia 2023).

Penelitian dengan pendekatan deskriptif murni dengan tujuan utama memberikan gambaran yang detail dan lengkap tentang suatu variabel mandiri atau fenomena, tanpa melibatkan perbandingan atau keterkaitan dengan variabel lain (Chalirafi et al. 2021; Mariana 2022; M. Mariana, Abdullah, and Nadirsyah 2018). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif cenderung lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks alami tempat penelitian. Ini mencakup faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi fenomena yang diteliti (M. Mariana 2019a; Nufiar et al. 2022; Nufiar, Mariana, and Muhammad Ali 2020; Sugiyono 2005).

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner, wawancara, observasi, atau studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait fenomena yang diamati (Fajri et al. 2023; Jemarut, Andriani, and Pahrur Riza 2023; M. Mariana 2019b; M. Mariana and Amri 2021; Taher 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek Pengupahan Kuli Angkut di Pasar Beureunuen

Kuli angkut barang merupakan salah satu pelaku ekonomi di bidang penyedia jasa. Dapat dijumpai di pasar, terminal, dan stasiun. Keberadaan kuli angkut barang adalah fenomena sosio-ekonomi yang tak terhindarkan. Dan termasuk dalam kelompok manusia yang harus mencari nafkah dengan menjadi kuli angkut barang. Di pasar Beureunuen, kuli angkut sudah hadir sejak tahun 1985, membentuk komunitas buruh yang dikenal sebagai PBB (Persatuan Buruh Beureunuen). Affan menjadi penggerak buruh pertama, sedangkan Aiyub merupakan buruh pertama yang bekerja dan kini menjadi pimpinan Persatuan Buruh Beureunuen. Selanjutnya, Abdullah sudah bekerja sebagai buruh sejak tahun 1970.

Sistem pembayaran yang diterapkan di pasar Beureunuen menggunakan perhitungan harga barang, yakni sebesar 15% dari harga ongkos kirim dari Medan atau disebut repas dalam bahasa kuli. Jika ada satu hingga lima truk masuk dan terjadi pengangkutan barang hingga enam repas dalam sehari, pembayaran akan dilakukan sesuai jumlah repas yang dikalikan dengan 15%. Upah langsung diberikan pada hari yang sama setelah pekerjaan selesai. Sistem kerja kuli angkut bersifat kelompok, bukan individual, dan upah dibayarkan setiap harinya tanpa penundaan.

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak untuk para pekerja atas kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Pembayaran upah disesuaikan dengan jam kerja, jumlah barang yang diangkut, atau pelayanan yang diberikan. Setiap kuli angkut mendapatkan bagian yang sama dalam sistem kerja kelompok. Sebagai contoh, jika harga barang satu repas adalah Rp. 350.000, maka setiap kuli akan mendapatkan 15% dari Rp. 350.000, yakni Rp. 52.500. Jumlah ini kemudian dibagi rata kepada semua kuli. Dengan 3-5 repas per hari, setiap buruh bisa memperoleh Rp. 60.000 setelah dipotong uang sosial dan biaya makan siang yang sudah ditanggung oleh pemimpin buruh.

Namun, terdapat variasi dalam besaran upah, dengan beberapa pekerja hanya memperoleh Rp. 20.000 per hari bahkan ada yang tidak menerima upah sama sekali. Jarak tempuh yang ditempuh dalam mengangkut barang, baik dengan jalan kaki atau menggunakan becak, tidak diperhitungkan dalam pembayaran upah. Meskipun demikian, pembayaran dilakukan sesuai dengan repas yang sudah disepakati, sehingga jarak tempuh tidak memengaruhi upah yang diterima.

Tidak terdapat kendala dalam pembayaran upah, karena pembayaran dilakukan setiap hari pada saat pulang. Kendala muncul hanya jika tidak ada truk yang masuk, sehingga tidak ada barang yang dapat diangkut dan upah tidak dapat diterima.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan kuli angkut di Pasar Beureunuen dilaksanakan dengan sistem pembayaran upah harian, mempertimbangkan jumlah repas. Upah dibayar setiap hari dengan persentase 15% dari repas, dan keseluruhan upah dibagi rata di antara semua kuli angkut yang terlibat.

Analisis Sistem Upah Kuli Angkut Pasar Beureunuen

Praktek pengupahan kuli angkut di Pasar Beureunuen mencerminkan dinamika unik dalam organisasi buruh. Sejak berdirinya pada tahun 1985, Persatuan Buruh Beureunuen (PBB) menjadi wadah komunitas bagi kuli angkut, dengan tokoh pionir seperti Affan dan Aiyub yang memainkan peran kunci. Affan sebagai penggerak buruh pertama, sedangkan Aiyub menjadi figur penting sebagai buruh pertama yang bekerja dan kini memimpin PBB.

Sistem pembayaran yang diterapkan menggambarkan keadilan dalam upah. Melalui perhitungan harga barang sebesar 15% dari ongkos kirim, atau yang dikenal sebagai repas, kuli angkut mendapatkan pembayaran setiap hari sesuai dengan jumlah repas yang diangkut. Sistem kerja yang kolaboratif, di mana upah dibayarkan kepada seluruh kelompok tanpa membedakan individu, memperlihatkan semangat solidaritas di antara kuli angkut.

Meskipun demikian, terdapat variasi dalam besaran upah yang diterima oleh kuli angkut. Beberapa buruh dapat memperoleh jumlah yang signifikan, sementara yang lain hanya menerima sejumlah kecil atau bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali. Kendala muncul ketika tidak ada truk yang masuk, mengakibatkan ketidakterdediaan barang yang dapat diangkut dan, sebagai hasilnya, upah tidak dapat diterima.

Jarak tempuh dalam mengangkut barang tidak menjadi faktor penentu dalam perhitungan upah. Upah tetap dibayarkan sesuai dengan repas yang telah disepakati sebelumnya, menunjukkan kesepakatan yang kuat di antara para pihak terkait. Meski sistem ini berhasil menghindari kendala pembayaran upah, perlu diperhatikan upaya untuk menyeimbangkan besaran upah agar lebih adil di antara seluruh kuli angkut yang berpartisipasi. Keseluruhan, praktek pengupahan ini menciptakan pola kerja kolaboratif dengan karakteristik unik yang menjadi ciri khas di Pasar Beureunuen.

KESIMPULAN

Praktik pengupahan kuli angkut di Pasar Beureunuen dilaksanakan dengan sistem pembayaran upah harian, mempertimbangkan jumlah repas. Upah dibayar setiap hari dengan persentase 15% dari repas, dan keseluruhan upah dibagi rata di antara semua kuli angkut yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiyatna, Dirta Pratama, Nurlina T Muhyiddin, Dan Bambang, and Bemby Soebyakto. 2016. "Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(1): 8–21. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/index8>.
- Avzurni, Iqbal Samsa, and Indi Nuroini. 2023. "The Payment of Wages for Outsourced Workers of PT Carefastindo." 2.
- Bukit, Ipak Neneng Mardiah, Yulina Ismida, Rizcy Maulana, and Muhammad Nasir. 2018. "The Influence of Wage, Age and Experience to Labor Productivity in Construction Works in Kota Langsa, Aceh." *MATEC Web of Conferences* 147: 2–5.
- Chalirafi, . et al. 2021. "The Influence of Consumer Innovatively, Company Reputation, and E-Trust on E-Loyalty of E-Commerce Customers in Aceh." *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 21(16): 40–49.
- Fajri, Hersi et al. 2023. "The Influence of Teacher Competency, Motivation on Graduates' Performance and Their Implications for Graduate Absorption in Aceh." *Migration Letters* 20(S4): 111–22.
- Jemarut, Wihelmus, I Gusti Agung Andriani, and Pahrur Riza. 2023. "Penetapan Upah Minimum Dalam Perpektif Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4(1): 133–44. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/6457>.
- Mariana. 2022. *Informasi Akuntansi Dan Keputusan Kredit*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Mariana, Ibrahim. 2021. "Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945." *Jurnal Tahqiqqa* 15(1): 1–14.
- Mariana, Mariana. 2019a. "Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa Oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mutiara)." *Jurnal Tahqiqqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 14(1): 108–18. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqqa/article/view/61>.
- . 2019b. "Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 13(2): 190–203.
- . 2023. "Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie." *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2(2): 108–15.
- Mariana, Mariana, Syukriy Abdullah, and Nadirsyah Nadirsyah. 2018. "Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, Dan Keputusan Pemberian Kredit." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 8(2): 177.
- Mariana, Mariana, and Amsanul Amri. 2021. "Hawalah Mutlaqah Dalam Perspektif Syafi'iyah Dan Hanafiyah." *SINTESA: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 1(2): 136–47. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>.
- Nufiar, Mariana, and Muhammad Ali. 2020. "Settlement of Problematic Loans in

- the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District Did Sharia.” *Journal of Social Science* 1(4): 147–51.
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, and Mariana. 2022. “Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective.” *Baltic Journal of Law & Politics* 15(3): 1561–70.
- Okoye, Peter Uchenna, Kevin Chuks Okolie, Oluchukwu Precious-favour, and Gilbert Chidi Ohazulume. 2022. “Payment of Labour Wage for Construction Site Operations with Safety Risk.” *Management Dynamics in the Knowledge Economy* 10(2): 124–41.
- Rahmatullah, Iqbal, Mariana Mariana, and Armia Armia. 2023. “Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan.” *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2(2): 101–7.
- Ramadana, Sri Winarsih, and Rahmaniar Rahmaniar. 2023. “Penundaan Pembayaran Upah.” *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2(2): 80–87.
- Safriadi. 2018. “Upah Buruh Karyawan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pidie.” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 12(1): 105–15.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/6547/52>
23.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Syakur, Ahmad. 2016. “STANDAR PENGUPAHAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir).” *Universum* 9(1): 1–13.
- Taher, Alamsyah. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.